

KINERJA ORGANISASI PADA BIDANG TATA RUANG DIDINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN (PUPRP) KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Muhammad Rafly¹, Aries Singi², Zubair³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdul Azis Lamadjido, Jl. Dr. Suharso, Besusu Barat, Palu Timur, Palu, Indonesia.
Email: raflyafif465@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Organisasi Pada Bidang Tata Ruang di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Parigi Moutong. Metode penelitian adalah penelitian kualitatif,dengan informan sebanyak 5 (lima) orang informan yang dipilih berdasarkan purposive sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode : Observasi (pengamatan), Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian, bahwa Pelaksanaan Kinerja Organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Parigi Moutong, belum berjalan maksimal, karena sebagian dimensi belum berjalan maksimal, dimensi Struktur Organisasi masih belum ideal, masih berorientasi ke sektor izin dan belum ke fungsi pelayanan. Sedangkan Dimensi Human Resources (SDM) masih adanya rangkap tugas, selanjutnya SDM yang belum memahami tugas dan fungsinya, perlu peningkatan disiplin. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka beberapa saran sebagai solusi adalah melakukan penataan kembali struktur Organisasi agar lebih berorientasi pada fungsi layanan; perlu penambahan aparatur yang berlatar belakang sesuai dengan kebutuhan setiap bidangnya, guna untuk menghindari terjadinya rangkap tugas, mengadakan pendidikan atau pelatihan teknis bagi staf yang belum berkualifikasi dengan tugas pokoknya dan mengadakan kursus bahasa asing untuk melayani investor, dalam melaksanakan tugas kepemimpinan dalam pengambilan keputusan perlu melibatkan bawahan.

Kata Kunci : Kinerja, Kualitas, Efektifitas

ABSTRACT

This study aims to determine the Organizational Performance in the Spatial Planning Sector at the Public Works, Spatial Planning and Land Agency (PUPRP) of Parigi Moutong Regency. The research method is qualitative research, with 5 (five) informants selected based on purposive sampling. The data collection technique in this study used the following methods: Observation, Interview and Documentation. The results of the study, that the Implementation of Organizational Performance at the Public Works, Spatial Planning and Land Agency (PUPRP) of Parigi Moutong Regency, has not run optimally, because some dimensions have not run optimally, the Organizational Structure dimension is still not ideal, still oriented to the permit sector and not to the service function. While the Human Resources (HR) Dimension still has dual tasks, then HR who do not understand their duties and functions, need to improve disciplinesome suggestions as a solution are to rearrange the organizational structure to be more oriented towards service functions; it is necessary to add personnel with backgrounds according to the needs of each field, in order to avoid duplicate tasks, hold technical education or training for staff who are not yet qualified with their main duties and hold foreign language courses to serve investors, in carrying out leadership tasks in decision making it is necessary to involve subordinates.

Keywords: *Performance, Quality, Effectiveness*

A. PENDAHULUAN

Format kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara Undang-undang ini dimaksudkan bagi pemrintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Konsekuensi dari kebijakan tersebut menjadi suatu tuntutan bagi pemrintah daerah baik kota maupun kabupaten untuk dapat mandiri agar dapat melaksanakan tugas-tugas yang telah dilimpahkan pada daerah. lebih jauh lagi UU No.32 Tahun 2004 ini juga

¹ Widodo, Joko, Dr. M.S. 2008. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Bayumedia Publishing, cet. Keempat: Malang.

² Thoha, Miftah. 2010. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Raja Grafindo Persada: Jakarta

menitik beratkan pada otonomi daerah dengan tujuan lebih mendekatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat tercipta pelayanan yang lebih berkualitas yang bisa memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat yang dilayani. dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah tersebut, perubahan paradigma sekaligus juga ikut melepaskan makna hegemoni paham teknokrasi yang masih terus kita rasakan sekarang ini.³

Sebuah pemerintahan yang membuat konsep otonomi daerah sulit melepaskan orientasi pembangunannya, dan kepercayaannya kepada peran negara sebagai mesin pembangunan oleh negara. dengan munculnya paradigma baru tersebut, maka otonomi daerah tidak semata-mata sebagai kesiapan kepastian aparatur daerah, atau menyangkut kesuburan ekonomi pemerintah semata tetapi juga soal akses keterlibatan masyarakat, fasilitas perkembangan ekonomi swasta, penegakan asas good governance, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan lain sebagainya.

Mencermati kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat maka dibutuhkan sistem kerja yang lebih efektif dan efisien dalam menunjang pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna layanan publik. hal ini turut didukung pula dengan semakin berkembangnya era keterbukaan masyarakat yang mengakibatkan tuntutan yang lebih banyak kepada birokrasi pemerintah dan aparatnya

³ Suwarno, Yogi. 2008. *Inovasi di Sektor Publik*. STIA LAN: Jakarta

untuk dapat memberikan pelayanan yang prima. kepuasan masyarakat yang mengakses layanan publik adalah faktor penentu berhasil tidaknya kinerja setiap organisasi publik di mata masyarakat. Oleh karenanya pemahaman terhadap pihak yang berkepentingan atau pelanggan yang dalam hal ini adalah masyarakat luas sangat diperlukan. Penyelenggaraan pola pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan publik harus disesuaikan.⁴

Dampak dari kinerja organisasi pemerintah yang buruk menyebabkan kualitas pelayanan publik yang berjalan di tempat bahkan mengalami degradasi yang implikasinya meluas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bernegara. buruknya pelayanan publik selama ini menjadi salah satu point penting yang mendorong krisis kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Penyakit birokrasi ini telah sedemikian mengakar sehingga sangat sulit untuk diatasi. Buruknya mutu pelayanan birokrasi terhadap layanan masyarakat adalah rahasia umum yang telah diketahui secara luas, sehingga dalam pelaksanaannya tidak jarang terdapat lubang-lubang KKN atau penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik.⁵

Istilah ‘jika bisa diperlambat/dipersulit, mengapa harus dipercepat/dipermudah’ pada birokrasi sedemikian mengakar dalam masyarakat. Publik yang kadang sudah sangat paham dengan sistem birokrasi yang berbelit-belit, memakan waktu lama dan tidak efektif selalu lebih

⁴ Sutarto. 2002. *Dasar-dasar Organisasi (Kaidah Perilaku)* Cet. ke-2. Gadjah Mada university Press: Yogyakarta

⁵ Sumargono, Ahmad, Dr. SE, MM. 2009. *Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Bersih*. PKSSP: Jakarta

banyak memilih untuk mengambil jalan pintas agar bisa menyelesaikan urusan mereka dengan cepat. Hal inilah yang kemudian berpotensi menjadi cikal bakal kesempatan para pelaku layanan atau birokrat menyalahgunakan jabatan dan wewenang mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ada banyak penyebab rendahnya mutu kinerja birokrasi masa kini dikarenakan masih bercokolnya sistem aristokrat. Yaitu dimana pejabat yang memiliki kekuasaan merasa lebih berkuasa dan memiliki kekuatan ketimbang bawahannya, sehingga sikap atasan yang terkesan ‘bossy’ berdampak pada kinerja bawahannya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ketika memberikan pelayanan. Masyarakat masih saja dihadapkan dengan sistem birokrasi yang berbelit-belit, cenderung korup dan nepotisme, kurang responsif dan jauh dari kesan efisien ataupun efektif. Berbagai penyakit birokrasi ini bisa saja diatasi jika dimulai dari aparatnya sendiri. Dimulai dengan baiknya gaya kepemimpinan atasan yang akan menularkan suasana yang baik dalam lingkungan kerja. Sehingga tercipta birokrasi yang sehat, yang mengacu pada kepentingan masyarakat serta bertujuan pada customer oriented.⁶

Tidak bisa kita tampik bahwa kondisi inilah yang kini banyak terjadi di Indonesia pada umumnya, padahal cara-cara seperti ini sudah tidak relevan atau tidak cocok dan sejalan lagi dengan era keterbukaan dan globalisasi yang dimana dituntut untuk dapat kompetitif dalam

⁶ Sinambela, LijanPoltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. PT. BumiAksara: Jakarta

meningkatkan kualitas pelayanan publik. hal ini bukan hanya dituntut pada birokrasi di level atas melainkan juga sampai pada birokrasi pada level paling bawah di daerah, pada tingkat kecamatan bahkan sampai tingkat level desa. Birokrasi pemerintahan harus mampu dan siap untuk memperbaiki kinerjanya dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Hal-hal tersebut adalah yang berkaitan dengan perbaikan strategi, struktur, sistem, kultur, dan prosedur pelayanannya. Dengan demikian dapat diharapkan perbaikan kinerja menjadi lebih efektif dan efisien dan berkualitas. Nantinya hal ini akan mendorong kepuasan publik yang menjadikan publik bisa menaruh kepercayaan kembali pada pemerintah dalam memberikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat kini. Ini juga akan berdampak baik bagi terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dalam birokrasi sehingga mendorong kinerja birokrasi lebih handal, produktif, kreatif, responsif dan akuntabel dalam menyikapi era yang sangat kompetitif seperti sekarang ini.⁷

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik diakui memang menjadi kebutuhan yang sangat mendasar. Berbagai macam jenis pelayanan bagi masyarakat kini menjadi tuntutan. Sebut saja contohnya seperti pelayanan pembuatan KTP dan juga jenis-jenis perizinan lain seperti akta kelahiran, pernikahan, kematian, surat persetujuan bangunan gedung, dan masih banyak hal lain lagi. Memang tidak bisa dipungkiri jika dalam melakukan proses pelayanan tidak terlepas

⁷ Sinaga, Anggiat, M. 2006. *Birokrasi Dalam Sistem Administrasi Negara Indonesia*. STIA LAN: Jakarta

dari berbagai macam masalah-masalah yang akan muncul berkenan dengan kondisi pelayanan tersebut apakah memuaskan atau malah mengecewakan.⁸

Fenomena tersebut diatas juga banyak terjadi pada organisasi pemerintah manapun juga seperti halnya dengan Bidang Tata Ruang Dinas PUPRP, masih banyaknya problem dan keluhan yang berasal dari masyarakat mengenai keterlambatan dalam hal pengurusan rekomendasi keterangan rencana kabupaten (KRK), menjadikan tanda tanya yang cukup besar mengenai kinerja organisasinya. permasalahan yang menjadi kendala dalam hal mengeluarkan rekomendasi keterangan rencana kabupaten (KRK) terkendala dengan jarak membangun yang harus di sesuaikan dengan garis sempadan bangunan (GSB). Kondisi pelayanan masih dihadapkan pada sistem yang belum efektif dan efisien serta belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, terlihat dari banyaknya keluhan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai kinerja aparatur. Banyaknya peraturan yang tumpang tindih, prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, tingginya biaya yang harus dikeluarkan, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, sikap petugas yang kurang responsif, sarana yang kurang menunjang dan lain-lain menimbulkan citra kurang baik terhadap kinerja Pemerintah Daerah.⁹

⁸ Robbins, Stephen P. 2023. *Perilaku Organisasi*. PustakaBinaanPresindo: Jakarta

⁹ Purwanto, Erwan Agus, Ph. D dan Wahyudi Kumorotomo, MPP. 2005. *Birokrasi Publik Dalam Sistem Politik Semi Parlementer*. Gava Media: Yogyakarta

Kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan di Provinsi Sulawesi Tengah pada hakikatnya merupakan salah satu upaya perbaikan kualitas pelayanan publik untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara berkesinambungan, yang dilaksanakan melalui pemberian sistem pelayanan secara menyeluruh, dan terintegrasi dengan strategi maupun kebijakan nasional. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, mempunyai tugas pokok dan fungsi seperti yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 72 Tahun 2009, dengan Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong mempunyai Tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dengan Prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Keamanan Berkas, dan Kepastian.¹⁰

Sejalan dengan misi pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang kini membuka peluang besar terhadap investasi yang berasal dari luar daerah, tentu saja beban kerja pelayanan semakin berat dan beragam. Oleh karena itu Kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong diharapkan mampu menghandle kebutuhan publik dalam masalah pelayanan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya,

¹⁰ Pamungkas. 2000. *Perilaku Organisasi, Konsep Kontroversi, Aplikasi*. Prenhallindo: Jakarta

tentu saja Dinas PUPRP masih memiliki sejumlah kekurangan dan kendala dalam bekerja melakukan pelayanan terhadap publik. Apakah sistem yang ada telah berjalan dengan baik sesuai tugas dan fungsinya atau memang belum berjalan dengan baik sehingga mutu pelayanan belum bisa dikatakan memuaskan masyarakat. Atau apakah masyarakat belum terlalu paham dengan sistem yang telah dibuat tersebut dan memiliki beberapa kendala sehingga layanan yang diberikan memang terasa belum maksimal dirasakan. Untuk mengatasi semua hal itu, maka diharapkan adanya perbaikan kinerja pegawai pada Dinas PUPRP untuk menghasilkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat sebagai penerima layanan.

Oleh karena ini itulah penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Kinerja Organisasi pada Bidang Tata Ruang di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Parigi Moutong”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang kiranya ingin diteliti oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu : “ Bagaimana Kinerja Organisasi pada Bidang Tata Ruang di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Parigi Moutong?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.¹¹ Lokasi penelitian dilakukan pada Bidang Tata Ruang di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong dimulai bulan Oktober sampai dengan Desember 2023.

D. PEMBAHASAN

Kinerja yang baik adalah kinerja yang mengikuti tata cara atau prosedur sesuai standar yang telah ditetapkan. Akan tetapi didalam kinerja tersebut harus memiliki beberapa kriteria agar meningkatkan produktifitas sehingga apa yang diharapkan bisa berjalan sesuai apa yang di inginkan. Untuk meningkatkan kinerja yang baik harus intropeksi diri demi tercapainya kinerja yang lebih baik kedepannya, bekerja sesuai posisi, dan jobnya masing-masing pelayanan. Sedangkan Dimensi Human Resources (SDM) pada dasarnya masih adanya rangkap tugas, selanjutnya SDM yang ada perlu memahami tugas dan fungsinya, serta perlu peningkatan disiplin. Dimensi Teknologi dimana Bidang Tata Ruang di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan telah menyediakan *Informasi Technologi (IT)* yang kapasitasnya memadai untuk mendukung inovasi ke depannya, namun belum digunakan secara optimal karena keterbatasan SDM. Dimensi Finansial, pada dasarnya sudah mencukupi, tetapi belum maksimal digunakan

¹¹ Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. 1987. *Methode Penelitian Survey*. Cetakan II, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia

sesuai dengan fungsi organisasi.. Selanjutnya Dimensi Leadership, Kepemimpinan selalu terpusat perlu mempertimbangkan saran dan pendapat bawahan.

E. KESIMPULAN

Pelaksanaan Kinerja organisasi pada Bidang Tata Ruang di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) dapat disimpulkan belum maksimal, karena sebagian dimensi belum berjalan maksimal. Alasannya, dimana untuk Dimensi Struktur Organisasi masih belum ideal, karena masih berjalan ke sektor dan bukan ke fungsi pelayanan. Sedangkan Dimensi Human Resources (SDM) pada dasarnya masih adanya rangkap tugas, selanjutnya SDM yang ada perlu memahami tugas dan fungsinya, serta perlu peningkatan disiplin. Dimensi Teknologi dimana Bidang Tata Ruang di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan telah menyediakan *Informasi Technologi (IT)* yang kapasitasnya memadai untuk mendukung inovasi ke depannya, namun belum digunakan secara optimal karena keterbatasan SDM. Dimensi Finansial, pada dasarnya sudah mencukupi, tetapi belum maksimal digunakan sesuai dengan fungsi organisasi.. Selanjutnya Dimensi Leadership, Kepemimpinan selalu terpusat perlu mempertimbangkan saran dan pendapat bawahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi)*. Jakarta : PT. Rineka Cipta *Bisnis dan Ekonomi*, Penerbit PPM, Jakarta
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1997. *Teori Organisasi*. STIA-LAN Press: Jakarta
- Dwiyanto, Agus. 1999. *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik, Makalah Seminar Kinerja Organisasi Sektor Publik Kebijakan dan Persiapannya*. Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol UGM: Yogyakarta.
- Etzioni, Amitai. 1964. *Organisasi-organisasi Modern*. Terjemahan Suryatim. UI Press: Jakarta
- Faustino. 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Andi Offset: Yogyakarta
- Gibson J.L, Jhon M. Ivancevich, dan James H. Donnelly, Jr. 1984. *Organisasi dan Manajemen : Perilaku, Struktur, Proses*. Penerbit Erlangga: Jakarta Pusat
- Goggin, Malcolm L., et al. 1990. *Implementation Theory and Practice : Toward a Third Generation*, Glenview, Illinois, USA : Foresman and Company.
- Joedono, S.B. 1974. *Administrasi Pembangunan. Sebuah Pengantar*. Prisma No.4,4.
- Jones, Gareth R. 1991. *Organizational Theory: Text and Cases Addition*. Wesley Publishing Company, A & M University: Texas
- Keban, Yeremias. T. 1995, *Kinerja Organisasi Publik*, Bahan Seminar Sehari Dalam Rangka Purna Tugas Drs. Sediyono. Fisipol- UGM: Yogyakarta.
- Moenir, H.A.S. 1992. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. BumiAksara: Jakarta.
- Moleong, L.J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda

- Karya: Bandung
- Pamungkas. 2000. *Perilaku Organisasi, Konsep Kontroversi, Aplikasi*. Prenhallindo: Jakarta
- Purwanto, Erwan Agus, Ph. D dan Wahyudi Kumorotomo, MPP. 2005. *Birokrasi Publik Dalam Sistem Politik Semi Parlementer*. Gava Media: Yogyakarta
- Robbins, Stephen P. 2023. *Perilaku Organisasi*. Pustaka Binaan Presindo: Jakarta
- Sinaga, Anggiat, M. 2006. *Birokrasi Dalam Sistem Administrasi Negara Indonesia*. STIA LAN: Jakarta
- Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. PT. Bumi Aksara: Jakarta
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. 1987. *Methode Penelitian Survey*. Cetakan II, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia
- Steers, Richard, M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Erlangga: Jakarta.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta cet. ke-3: Bandung
- Sumargono, Ahmad, Dr. SE, MM. 2009. *Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Bersih*. PKSSP: Jakarta
- Sutarto. 2002. *Dasar-dasar Organisasi (Kaidah Perilaku)* Cet. ke-2. Gadjah Mada university Press: Yogyakarta
- Suwarno, Yogi. 2008. *Inovasi di Sektor Publik*. STIA LAN: Jakarta
- Thoha, Miftah. 2010. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Widodo, Joko, Dr. M.S. 2008. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Bayumedia Publishing, cet. Keempat: Malang.